

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana (Ismail, 2010). Pendanaan bank berasal dari dana bank sendiri, dana pemerintah daerah, dan dana pinjaman. Perbankan dalam banyak dengan memberikan dana kepada masyarakat lokal dalam bentuk pinjaman, guna meningkatkan daya beli dan usaha masyarakat lokal, dan pada akhirnya mengembangkan perekonomian Indonesia.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat, dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kredit merupakan salah satu bentuk kegiatan penyaluran dana ke masyarakat yang bermanfaat untuk membantu baik orang perorangan maupun badan usaha yang membutuhkan dana sehingga kredit sudah menjadi fungsi utama dari bank karena sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menyebutkan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Kredit memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian, baik bagi individu, perusahaan, maupun negara. Bagi individu, kredit memberikan kemudahan untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Bagi perusahaan, kredit memungkinkan ekspansi usaha, pembelian bahan baku, serta investasi dalam teknologi atau infrastruktur yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing. Selain itu, kredit juga dapat mendukung



pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dengan mendorong investasi dan konsumsi. Oleh karena itu, kredit sangat diperlukan untuk mengoptimalkan manfaatnya dalam berbagai sektor ekonomi.

Fungsi pokok kredit pada dasarnya ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Keberadaan UMKM diharapkan dapat mengatasi serta memberikan kontribusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi saat ini, misalnya masalah kemiskinan, pengangguran dan tingkat pendapatan yang diperoleh masih tergolong rendah. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) lahir sebagai respon atas keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Pecepatan Pengembangan Sektor riil dan pemberdayaan UMKM khususnya Bidang Reformasi Sektor Keuangan yang bertujuan untuk menggerakkan sektor riil melalui kredit modal kerja dan kredit investasi bagi usaha produktif (Mikro et al., 2015).

Salah satu program yang dilaksanakan pemerintah yaitu program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit modal kerja dan atau kredit investasi yang diberikan oleh Perbankan kepada usaha yang feasible tetapi belum bankable yang didukung dengan program penjaminan. Masyarakat dapat memperoleh tambahan modal melalui penyaluran KUR. KUR digunakan untuk membantu meningkatkan jalannya usaha lewat pembiayaan. Modal merupakan sarana pendukung dalam kelangsungan usaha. Oleh sebab itu, pemerintah ikut serta membantu dengan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Monulandi, 2014).

KUR merupakan layanan pembiayaan yang diberikan pemerintah melalui lembaga keuangan atau perbankan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah atau Koperasi. Namun mensyaratkan pelaku bisnis sudah memiliki



usaha yang feasible alias memiliki kelayakan, potensi dan yang baik sehingga dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Sedangkan untuk jenis usaha yang bisa mengajukan KUR adalah semua bentuk usaha mulai dari sektor produktif seperti pertanian, perikanan, industri, kehutanan dan jasa keuangan, tentunya dengan catatan sudah memiliki neraca keuangan yang baik. Diharapkan dengan adanya program pemerintah ini dapat memberikan manfaat bagi para pelaku usaha, dan mendapatkan akses keuangan yang lebih mudah bagi para pengusaha menengah dapat berkembang dan memberikan dampak positif bagi perekonomian rakyat.

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi efektivitas KUR adalah suku bunga, yang menjadi biaya pinjaman yang harus dibayar oleh penerima kredit. Suku bunga yang ditetapkan untuk KUR biasanya lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga pinjaman konvensional, untuk memberikan kemudahan dan meringankan beban usaha kecil. Namun, perbedaan tingkat suku bunga ini juga memiliki dampak terhadap keberlangsungan usaha penerima kredit, mengingat pengaruh suku bunga terhadap kemampuan membayar dan kemampuan pengusaha dalam mengelola dana pinjaman. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi hubungan antara tingkat suku bunga KUR dengan kinerja UMKM, guna mengetahui apakah suku bunga yang rendah benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kinerja dan daya saing usaha kecil di Indonesia.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yaitu sektor usaha yang merupakan penopang perekonomian nasional. Peranan UMKM di dalam perekonomian Indonesia ditunjukkan sebagai salah satu fasilitas untuk mengurangi kemiskinan, sebagai alat dalam proses untuk lebih pemeratakan



perekonomian masyarakat yang kurang mampu, serta sebagai salah satu pendapatan negara (Anwar, 2011).

Beberapa penelitian yang dilakukan UMKM menunjukkan bahwa mereka memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi karena tingkat penyerapan tenaga kerjanya yang relatif tinggi dan kebutuhan modal investasinya yang kecil. Dengan demikian, UMKM tidak rentan terhadap berbagai perubahan eksternal dan pengembangan pada sektor UMKM dapat menunjang pertumbuhan ekonomi yang digunakan sebagai penopang pembangunan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan.

Namun UMKM masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan dalam menghadapi persaingan. Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pengusaha UMKM dalam meningkatkan kinerja usahanya terutama dari segi pendapatan adalah keterbatasan modal yang dimiliki. Permodalan merupakan salah satu permasalahan awal yang dihadapi dengan terbatasnya akses terhadap pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan (Suhartini, 2014).

Kabupaten Bone yang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki jumlah UMKM sebanyak 13.000, pelaku UMKM berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bone pada tahun 2022 dengan berbagai jenis usaha seperti kerajinan tangan, makanan hingga fashion. Salah satu UMKM yang terkenal dan banyak digemari adalah kerajinan songkok recca.

Tabel 1.1 Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Per Skema Tahun 2020-2022 (Miliar-Triliun)

Tahun	Mikro	Kecil	Supermikro	Total
2020	851,08	159,46	32,75	1.043
2021	1.02	277,20	24,22	1.325
2022	1.30	299,78	14,95	1.610

Sumber Data : Kementerian Keuangan RI, 2023.



Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu program pemerintah yang dirancang untuk mendukung pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan supermikro dengan memberikan kemudahan akses pembiayaan yang lebih terjangkau dan tidak memberatkan. Mikro, kecil, dan supermikro adalah kategori usaha yang digunakan untuk mengklasifikasikan skala bisnis berdasarkan ukuran, pendapatan, dan jumlah tenaga kerja yang dimiliki. Usaha mikro umumnya memiliki jumlah karyawan yang sangat terbatas (biasanya di bawah 5 orang) dan pendapatan tahunan yang relatif rendah, seringkali kurang dari satu miliar rupiah. Usaha kecil memiliki jumlah karyawan antara 5 hingga 19 orang dan pendapatan tahunan yang sedikit lebih tinggi dari usaha mikro, namun tetap berada dalam skala yang terbatas. Sementara itu, usaha supermikro adalah usaha yang memiliki karakteristik lebih kecil dari usaha mikro, baik dari segi pendapatan maupun jumlah karyawan, dan sering kali dijalankan oleh individu atau keluarga dalam skala yang sangat kecil.

Seperti pada Tabel 1.1 Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) khususnya di Kabupaten Bone sebagai trigger bagi para pemangku kepentingan terkait, realisasi KUR di Kab. Bone tahun 2022 mencapai Rp1,610 triliun yang disalurkan kepada 34.240 debitur atau 9,14% dari total realisasi Rp17,63 triliun di Provinsi Sulawesi Selatan. Bila dilihat dari jenis skema kredit pada Tahun 2020, Kredit Mikro merupakan yang terbesar realisasi di Kabupaten Bone, yaitu sebesar Rp 851,08 Miliar atau 81,57%. Disusul, Kredit Kecil sebesar Rp 159,46 Miliar atau 15,28%, Kredit Supermikro sebesar Rp 32,75 Miliar atau 3,14%. Kemudian pada tahun 2021 Bone Peringkat Kedua Serap KUR, Sebesar Rp 1,33 Triliun, Bila dilihat dari jenis skema kredit, Kredit Mikro merupakan yang terbesar di Kabupaten Bone yaitu Rp 1,02 Triliun atau 77,26%. Disusul, Kredit Besar Rp 277,20 miliar atau 20,92%, dan Kredit Super Mikro (Supermi)



sebesar Rp 24,22 Miliar atau 1,83%. Dan pada tahun 2022 KUR Mikro disalurkan sebesar Rp1,30 miliar atau 80,46% dari total penyaluran KUR kepada 31.519 debitur. Untuk KUR kecil sebesar Rp299,78 miliar atau 18,62% untuk 1.145 debitur, sedangkan KUR super mikro disalurkan sebesar Rp14,95 miliar atau 0,93% untuk 1.576 debitur.

Tabel 1. 2 Lembaga Penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Bone Tahun 2022

No	Lembaga Penyalur	Nilai	Persen	Debitur
1	BRI	1.41 triliun	87,37	32.872
2	BNI	94,40 miliar	5,86	350
3	Mandiri	90,75 miliar	5,64	611
4	BSI	12.22 miliar	0,76	142
5	BPD	2,56 miliar	0,16	33
6	Pegadaian Syariah	2.18 miliar	0,14	229
7	BTN	950 juta	0,06	2
8	BCA	300 juta	0,02	1

Sumber Data: Kementerian keuangan RI, 2023.

Berdasarkan penyalur lembaga diatas, masih didominasi oleh peringkat pertama oleh Bank BRI yang merupakan penyalur terbesar yaitu mencapai nilai Rp1,41 triliun atau 87,37% dari total penyaluran KUR yang terdistribusi kepada 32.872 debitur. Bank Rakyat Indonesia (BRI) memiliki keunggulan yang signifikan dalam hal penyaluran Kredit Usaha Rakyat dibandingkan dengan bank lain, yang menjadikannya sebagai pemimpin pasar dalam program ini. Salah satu alasan utama adalah jaringan cabang BRI yang sangat luas, terutama di daerah pedesaan dan wilayah-wilayah terpencil, yang memudahkan akses bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan supermikro.

Disusul Bank BNI dengan penyaluran sebesar Rp94,40 miliar atau 5,86% untuk 350 debitur. Urutan selanjutnya adalah Bank Mandiri dengan penyaluran sebesar Rp90,75 miliar atau 5,64% untuk 611 debitur. Bank



Syariah Indonesia juga berkontribusi dengan menyalurkan sebesar Rp12,22 miliar atau 0,76% ditujukan untuk 142 debitur. Berikutnya adalah Bank Pembangunan Daerah yang menyalurkan sebesar Rp2,56 miliar atau 0,16% untuk 33 debitur, Pegadaian Syariah juga turut berperan dengan nilai penyaluran sebesar Rp2,18 miliar atau 0,14% untuk 229 debitur, Tidak ketinggalan Bank BTN turut serta dengan nilai Rp950 juta atau 0,06% untuk 2 debitur, serta Bank BCA dengan penyaluran Rp300 juta atau 0,02% untuk 1 debitur.

Tabel 1.3 Penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2022 di Kabupaten Bone

No.	Penyerapan KUR	Persentase
1	Pertanian, Perburuan, dan kehutanan	65,31
2	Perdagangan besar dan Eceran	23,12
3	Perikanan	3,67
4	lainnya	7,90

Sumber: Kementerian Keuangan RI, 2023.

Sementara itu, jika dilihat tabel 1.3 pada penyerapan kredit usaha rakyat (KUR) tahun 2022 di Kabupaten Bone dari berbagai sektor ekonomi seperti Sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan masih merupakan sektor KUR terbesar tahun 2022, yaitu sebesar Rp1,05 triliun atau 65,31% untuk 25.255 debitur. Selanjutnya disusul sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan nilai sebesar Rp372,33 miliar atau 23,12% untuk 5.625 debitur, sektor perikanan sebesar Rp59,14 miliar atau 3,67% untuk 1.323 debitur, sisanya terdistribusi dari berbagai sektor lainnya.

Mencermati tingginya minat masyarakat dalam melakukan permintaan KUR. banyak faktor-faktor yang mempengaruhi daya tarik masyarakat dalam ambil kredit usaha rakyat, seperti jangka waktu peminjaman, lama usaha, penghasilan usaha. Jangka waktu peminjaman merupakan salah satu



faktor penting yang memengaruhi keputusan pengusaha kecil dalam mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR sebagai instrumen pembiayaan yang ditujukan untuk memperkuat sektor UMKM, sangat bergantung pada kemampuan pelaku usaha dalam mengelola cicilan pinjaman. Jangka waktu pinjaman yang lebih panjang memberikan keuntungan berupa angsuran yang lebih ringan dan waktu lebih fleksibel bagi pengusaha untuk menghasilkan keuntungan dan melunasi kredit, sehingga meningkatkan daya tarik KUR. Namun, jangka waktu pendek dengan cicilan besar dapat menjadi kendala, terutama bagi usaha yang belum memiliki arus kas yang stabil, sehingga menurunkan minat pengajuan kredit. Kondisi ini menunjukkan pentingnya menyeimbangkan jangka waktu peminjaman dengan kapasitas keuangan pelaku usaha agar KUR dapat menjadi solusi pembiayaan yang efektif dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Lama usaha berpengaruh signifikan terhadap permintaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena mencerminkan stabilitas dan kelayakan bisnis dalam mengelola pinjaman. Usaha yang sudah berjalan lebih lama biasanya memiliki arus kas yang lebih stabil, pengalaman lebih dalam menjalankan bisnis, serta rekam jejak yang lebih jelas, sehingga lebih percaya diri dalam mengajukan kredit dan lebih dipercaya oleh lembaga keuangan. Pengusaha dengan usaha yang sudah matang cenderung memiliki kebutuhan pembiayaan yang lebih besar. Sebaliknya, usaha yang baru berjalan mungkin masih ragu atau dianggap berisiko oleh bank, karena belum memiliki kestabilan atau jaminan yang cukup, sehingga permintaan kredit dari usaha yang lebih baru cenderung lebih rendah.

Penghasilan usaha sangat memengaruhi permintaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena mencerminkan kemampuan bisnis dalam membayar cicilan

1. Usaha dengan penghasilan yang stabil dan tinggi cenderung lebih untuk mengajukan KUR karena memiliki finansial yang lebih baik untuk



memenuhi persyaratan kredit dan membayar kembali pinjaman tepat waktu. Penghasilan yang baik juga meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan untuk memberikan kredit, karena dianggap lebih mampu mengelola risiko dan bertahan dalam jangka panjang. Sebaliknya, usaha dengan penghasilan rendah atau tidak stabil mungkin merasa ragu untuk mengambil kredit, atau mengalami kesulitan dalam mendapatkan persetujuan karena dianggap berisiko gagal bayar, sehingga permintaan kredit dari usaha semacam ini cenderung lebih rendah.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah akses terbatas ke modal. Modal menjadi fondasi utama dalam menjalankan dan mengembangkan sebuah usaha. Sumber pembiayaan yang terbatas membuat banyak UMKM kesulitan untuk memulai, memperluas, atau bahkan bertahan dalam persaingan pasar yang semakin ketat. Oleh karena itu, kehadiran Kredit Usaha Rakyat tentunya diharapkan bisa membantu permasalahan yang ada dan pelaksanaan ini diharapkan bisa menjadi solusi. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di kabupaten Bone”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini, antara lain:

1. Apakah jangka waktu peminjaman berpengaruh terhadap permintaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di kabupaten Bone?
2. Apakah penghasilan usaha berpengaruh terhadap permintaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di kabupaten Bone?



Apakah lama usaha berpengaruh terhadap permintaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Bone?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh jangka waktu peminjaman kredit terhadap permintaan Kredit Usaha Rakyat di kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui pengaruh penghasilan usaha terhadap permintaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di kabupaten Bone.
3. Untuk mengetahui pengaruh lama usaha terhadap permintaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di kabupaten Bone

1.4 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terkait dengan Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Bone diantaranya :

1. Untuk mengetahui apakah jangka waktu peminjaman, penghasilan usaha, dan lama usaha berpengaruh terhadap permintaan kredit usaha rakyat di kabupaten Bone.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai gambaran tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para pengambil keputusan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kredit, khususnya dalam menyalurkan kredit yang lebih efektif.
3. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Permintaan

Dalam ilmu ekonomi, konsep permintaan (demand) memiliki makna khusus yang selalu merujuk pada keterkaitan antara jumlah barang yang ingin dibeli dengan harga barang tersebut. Gilarso (2001) mendefinisikan permintaan sebagai jumlah komoditas yang dapat dan akan dibeli pada berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu, dengan asumsi bahwa semua parameter lainnya tetap konstan (*Ceteris Paribus*).

Permintaan biasanya didefinisikan sebagai banyaknya item yang dicari di pasar tertentu pada tingkat harga tertentu dan pada tingkat pendapatan tertentu. Jumlah barang yang diinginkan dan dapat dibeli oleh pembeli disebut permintaan, menurut N.Gregory Mankiw (2019), Permintaan akan uang bisa tidak stabil ketika aset moneter dan nonmoneter sulit dilakukan karena adanya kebijakan – kebijakan moneter yang memengaruhi permintaan namun tidak mempertimbangkan kebijakan nonmoneter. Maka dari itu, dengan mempertimbangkan kebijakan-kebijakan nonmoneter seperti misalnya kebijakan-kebijakan yang menyangkut pembiayaan infrastruktur, maka pertumbuhan permintaan akan uang tetap bisa stabil bahkan meningkat dengan tetap memperhatikan kebijakan-kebijakan moneter yang ada.

Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan teori yang menyatakan bahwa semakin banyak permintaan untuk suatu barang atau jasa, semakin murah harganya. Di sisi lain, semakin sedikit permintaan untuk suatu barang atau jasa, mahal harganya. Meskipun jumlah permintaan untuk suatu barang atau sebenarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, hukum permintaan



memperhitungkan sifat hubungan antara harga barang atau jasa dan jumlah yang diminta, yaitu sebagai berikut 1) harga barang itu sendiri, apabila harga suatu barang atau jasa semakin rendah, maka jumlah permintaan terhadap barang tersebut akan bertambah. Sebaliknya, jika harga suatu barang semakin tinggi, maka jumlah permintaan terhadap barang tersebut akan berkurang, 2) harga barang lain, untuk hal ini dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu a) barang-barang yang dapat menggantikan fungsi komoditas lain disebut barang substitusi. Permintaan untuk barang yang dapat digantikan dapat dipengaruhi oleh harganya; jika barang pengganti lebih murah, maka akan ada lebih sedikit permintaan untuk barang yang dapat digantikan, b) komoditas yang bekerja paling baik jika digabungkan dengan barang lain dikenal sebagai barang komplementer. Permintaan barang komplementer selalu berfluktuasi seiring dengan perubahan permintaan barang lainnya, c) dalam kasus komoditas netral, pergeseran permintaan untuk komoditas yang satu tidak akan berdampak pada permintaan untuk komoditas yang lain jika kedua barang tersebut tidak terkait erat. 3) Permintaan akan suatu produk meningkat secara proporsional dengan pendapatan konsumen. Di sisi lain, permintaan untuk suatu produk menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan, 4) rasa keinginan orang untuk membeli berbagai jenis barang atau jasa secara signifikan dipengaruhi oleh perubahan selera atau rasa, 5) perubahan populasi mungkin tidak selalu berarti peningkatan permintaan namun, ketika lebih banyak orang dipekerjakan, daya beli mereka meningkat dan lebih banyak orang mendapatkan penghasilan, yang pada gilirannya meningkatkan permintaan, 6) prediksi tentang masa depan, pelanggan akan mempertimbangkan untuk membeli suatu barang pada masa kini

rkirakan harganya akan naik di masa depan.



Permintaan konsumen dipengaruhi oleh sejumlah variabel, yang jika digabungkan akan menentukan kisaran dan volume barang dan jasa yang dibutuhkan setiap individu. Danniell (2004) menyebutkan beberapa variabel yang dapat mempengaruhi permintaan, termasuk harga barang dan jasa, harga barang alternatif atau barang komplementer, preferensi konsumen atau pola pembelian, ukuran populasi, dan tingkat kekayaan (Karina et al, 2020).

Kurva permintaan menurut Sukirno (2005) adalah "kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang diminta oleh para pembeli." Karena fluktuasi harga hanya berdampak pada jumlah komoditas yang diminta, maka pergerakan harga selalu mencerminkan kurva permintaan. Namun, kurva permintaan akan bergerak, yang dikenal sebagai perubahan permintaan, jika Faktor-faktor permintaan yang tidak terkait dengan perubahan harga termasuk pendapatan per kapita, harga komoditas, dan preferensi konsumen.

2.1.2 Konsep Perbankan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 November 1998, perbankan didefinisikan sebagai: badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain dalam upaya meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perusahaan yang dinamis, bank mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Bank tidak hanya menyimpan dan memberikan kredit; mereka juga membuat alat pembayaran, stabilisasi moneter, dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Kegiatan utama bank adalah



ipulkan uang dari orang-orang, menyalurkannya kembali ke orang-orang, menyediakan layanan bank lainnya (Anwar, 2017).

Perbankan berfungsi sebagai penghubung antara kelompok yang membutuhkan uang dan kelompok yang memiliki uang. Bisnis utama bank adalah perkreditan dan penyaluran dana. Perbankan mendapatkan dana dari tabungan masyarakat. Namun, jumlah tabungan masyarakat ditentukan oleh pendapatan masyarakat. Semakin banyak pendapatan masyarakat, semakin banyak kredit yang diberikan. Salah satu jenis kredit yang ditawarkan oleh perbankan adalah kredit konsumsi, yang mencakup KPR dan kredit pemilikan rumah, yang merupakan jenis kredit yang digunakan untuk membeli rumah dengan membayar secara mengangsur (Ganthari, 2018).

Namun demikian, definisi perbankan yang lain dapat dikelompokkan menjadi tiga. dari ketiganya, yaitu: Pertama, bank dianggap sebagai penerima kredit. Dalam pengertian pertama ini, bank menerima uang dan dana lain dari masyarakat dalam bentuk simpanan, simpanan, dan giro. Pemahaman pertama ini mencerminkan kenyataan bahwa bank melakukan operasi perkreditan secara pasif dengan mengumpulkan uang dari pihak ketiga. Kedua, bank dianggap sebagai pemberi kredit, artinya aktif melakukan kegiatan perkreditan. Ketiga, bank dianggap sebagai pemberi kredit kepada masyarakat melalui penyertaan modal, simpanan masyarakat atau sumber penciptaan uang bank.

Dalam buku “Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank” (Anwar, 2017) yang membahas tentang tugas pokok bank umum berdasarkan pasal 6 UU No 7 15 Tahun 1992 dan UU No.10 Tahun 1998. Tugas pokok Bank Umum adalah sebagai berikut.

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (giro, deposito, dan bentuk tabungan lain).
- b. Memberikan pinjaman atau kredit.
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang



- d. Membeli, menjual atau menjamin resiko untuk kepentingan sendiri atas perintah nasabahnya.
- e. Memindahkan uang atau transfer
- f. Menempatkan dana pada bank lain dengan menggunakan cek atau sarana komunikasi yang lain.
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan antar pihak ke tiga.
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan satu kontrak.
- j. Menempatkan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- k. Membeli agunan melalui pelelangan jika debitur yang tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang di beli tersebut wajib dicairkan sebelumnya.
- l. Mengadakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan presentasi bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia.
- m. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
- n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.

Dalam buku yang sama juga membahas tentang kegiatan dari bank umum yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang

an. Berikut merupakan kegiatan dari Bank Umum berdasarkan pasal



- a. Menghimpun Dana (Funding)
- b. Menyalurkan Dana (Lending)
- c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (Services)

2.1.3 Teori Kredit

Kredit berasal dari kata latin “credere” yang berarti kepercayaan (kebenaran atau keyakinan), karena kredit pada hakikatnya diberikan berdasarkan keyakinan orang/pihak lain yang memberikannya terhadap kemampuan dan kejujuran si peminjam. Dari sudut pandang bank sebagai pemberi kredit, kepercayaan berarti bank percaya kepada nasabah sebagai penerima kredit bahwa pinjaman yang diberikan pasti akan dilunasi. Bayarlah sesuai akad. berarti mempercayai bank sehingga dengan yakin dapat membayar tagihan saluran dalam jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian sebelumnya. Apa yang dijanjikan bisa berupa barang, uang atau jasa. Kredit atau hutang biasanya berasal dari transaksi ekonomi dan keuangan di mana kreditur menyerahkan suatu nilai pada suatu waktu sebagai penukaran dengan janji debitur untuk membayarnya di masa depan. "Nilai yang diserahkan" dapat berupa uang, jasa, atau claim keuangan seperti saham atau obligasi. Namun, nasabah biasanya membayar hutang yang dihasilkannya dengan uang (Anwar, 2017).

Menurut Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas menurut Kasmir (2012) adalah sebagai berikut:



a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan pemberi suatu kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank kepada calon debitur karena sebelum dana tersebut disalurkan, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan tentang nasabah baik secara internal maupun eksternal. Sehingga dapat dinilai apakah calon debitur tersebut dipastikan memiliki kemauan dan kemampuan membayar kredit.

b. Kesepakatan

Unsur kepercayaan didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

d. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka akan semakin besar resikonya, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh



maupun oleh resiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam ingkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

e. Jasa

Balas Jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut kita kenal dengan nama bunga. Di samping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip Syariah balas jasa ditentukan dengan bagi hasil. Untuk menentukan berkualitas.

Kredit yang dikeluarkan oleh bank meliputi banyak jenis yang berbedabeda, tergantung pada kemampuan bank menyediakannya yang disalurkan. Begitu pula dengan jumlah dan tingkat bunga yang diberikan. Secara umum jenis kredit yang ditawarkan antara lain :

- a. Kredit investasi adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha untuk melakukan penanaman modal atau menanamkan modal.
- b. Kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan sebagai modal usaha
- c. Kredit perdagangan adalah kredit yang diberikan kepada pedagang untuk memperlancar, memperbesar atau memperluas kegiatan usahanya.
- d. Kredit produksi adalah kredit yang dapat berupa kredit investasi, kredit modal kerja, atau kredit komersial.
- e. Kredit konsumsi adalah kredit yang digunakan untuk kebutuhan pribadi, seperti kebutuhan konsumsi, meliputi pangan, sandang, dan perumahan (rumah).
- f. Kredit profesi merupakan kredit yang diberikan kepada kelompok profesi seperti pembicara, dokter, atau pengacara.

Kemudian terdapat juga tugas dan fungsi dari kredit yang merupakan salah

i misi bank itu sendiri. Berikut merupakan tujuan dari pemberian kredit (2017).



- a. Mencari Keuntungan Keuntungan yang dimaksud adalah dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah.
- b. Membantu usaha Nasabah Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja, dengan dana tersebut maka pihak debitur akan dapat mengembangkandan memperluas usahanya.

Membantu Pemerintah Semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor. Hal lain adalah: penerimaan pajak, membuka kesempatan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa, menghemat devisa negara.

2.1.4 Kredit Usaha Rakyat

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah skema kredit atau pembiayaan khusus yang diperuntungkan bagi UMKM dan koperasi yang usahanya layak, namun tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai persyaratan yang ditetapkan perbankan. Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Peraturan Menteri Keuangan No.135/PMK.05/2008 tentang fasilitas peminjaman KUR, KUR adalah Kredit/Pembiayaan kepada UMKM dalam bentuk Kredit Modal Kerja (KMK) dan atau Kredit Investasi (KI). Kredit modal kerja adalah kredit yang ditujukan untuk penggunaan pembiayaan kebutuhan dunia usaha akan modal kerja berupa penyediaan bahan baku, penyediaan produk akhir, dan penyediaan barang dalam proses produksi. Adapun Kredit Investasi yaitu kredit yang ditujukan untuk penggunaan pembiayaan sebagai modal tetap, yaitu peralatan produksi, gedumg,

an-mesin, juga untuk membiayai rehabilitas dan ekspansi relokasi proyek idirian proyek baru (Pratama, 2019).



Kebijakan pemerintah di dalam pengembangan pemerintah daerah atau otonomi daerah membuat UMKM lebih diperhatikan oleh pemerintah daerahnya, karena salah satu syarat utama untuk menjadi otonomi adalah bahwa daerah yang bersangkutan harus mempunyai pendapatan daerah yang cukup untuk membiayai roda perekonomian daerah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya kegiatan-kegiatan atau Lembaga-lembaga ekonomi lokal, termasuk UMKM yang akan memberikan kontribusi pada pendapatan daerah. Kredit Usaha Rakyat adalah program yang direncanakan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank.

Tujuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah untuk: (1) Meningkatkan perekonomian, dengan KUR maka pelaku UMKM akan mengembangkan usahanya dengan begitu pula perekonomian negara akan meningkat; (2) Pengentasan kemiskinan, dengan adanya KUR ancaman kebangkrutan UMKM akan berkurang, maka kemiskinan akan teratasi; (3) Penyerapan tenaga kerja, UMKM menggunakan KUR dalam mengembangkan usahanya maka saat usaha berkembang UMKM tersebut akan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Menurut Peraturan Kementerian Keuangan Pasal 1 butir 2 bahwa tujuan KUR adalah dalam rangka meningkatkan akses UMKM terhadap sumber pembiayaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Mulyawati, 2016).

Tujuan Program Kredit Usaha Rakyat adalah untuk mempercepat pengembangan sector primer dan pemberdayaan usaha skala kecil, untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap kredit dan Lembaga-lembaga keuangan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan memperluas kesempatan kerja. Pada dasarnya, KUR merupakan modal kerja dan kredit investasi yang disediakan

husus untuk usaha produktif melalui program penjaminan kredit.



Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sangat dipengaruhi oleh jangka waktu kredit yang diberikan sebagai penentu debitur dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, lama usaha juga berperan penting dalam evaluasi kelayakan penerima kredit, usaha yang telah berjalan lama dianggap lebih stabil dan berisiko rendah. Di sisi lain, penghasilan usaha menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan, pendapatan yang konsisten akan memperkuat penerima kredit dalam melunasi pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan Jangka Waktu Peminjaman Terhadap Permintaan Kredit

Usaha Rakyat

Menurut Hasibuan (2012: 63) kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kredit adalah salah satu usaha pemberian barang, jasa, atau uang dari suatu pihak (pemberi kredit) kepada pihak lain (penerima kredit) dimana penerima kredit harus mengembalikan kredit sesuai batas waktu yang diberikan disertai dengan suatu kontra prestasi (balas jasa) berupa bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Permintaan kredit adalah sejumlah kebutuhan individu atau masyarakat terhadap uang yang digunakan sebagai modal atau hal lain. Aplikasi hukum permintaan terhadap jangka waktu kredit yaitu pihak bank menetapkan jangka waktu peminjaman bagi debitur yang akan mengambil kredit usaha rakyat. Semakin tinggi jangka waktu kredit yang diberikan maka semakin tinggi pula permintaan kredit yang akan diajukan karena mereka dapat menyesuaikan dan

kirakan penghasilan atau omset yang akan mereka dapatkan sesuai jangka waktu peminjaman yang telah diambil.



2.2.2 Hubungan Penghasilan Usaha Terhadap Permintaan Kredit Usaha Rakyat

Tingkat penghasilan usaha yang dijalankan merupakan faktor penting dalam penerimaan jumlah kredit usaha yang diminta. Pada prinsipnya kredit usaha rakyat menargetkan jenis usaha kecil yang produktif dan prospektif dari sisi profit karena dari penghasilan usaha dapat diketahui besarnya usaha yang dijalankan serta kemampuan seseorang dalam mengembalikan kredit tersebut. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan pihak kredit untuk menyetujui besar kecilnya kredit usaha yang diminta dan disesuaikan dengan tingkat penghasilan usaha nasabah agar proses pengembalian kredit berjalan dengan lancar.

Berdasarkan uraian di atas semakin tinggi tingkat penghasilan usaha yang dihasilkan debitur maka semakin besar permintaan kredit usaha rakyat yang bisa diajukan guna mengembangkan aktivitas usaha yang mereka jalankan dan memaksimalkan keuntungan. Oleh karena itu dengan modal kredit yang digunakan disesuaikan dengan jenis usaha yang dijalankan oleh debitur. Jenis usaha yang dijalankan oleh debitur menentukan besarnya permintaan kredit usaha rakyat yang akan diajukan guna menjadi tambahan modal dalam mengembangkan usaha yang dijalankan.

2.2.3 Hubungan Lama Usaha Terhadap Permintaan Kredit Usaha Rakyat

Lama usaha adalah waktu yang telah dilalui oleh pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya dalam hal ini menggunakan satuan tahun. Lama usaha yaitu ukuran mengenai lama waktu atau masa kerja yang telah dan sedang ditempuh oleh pengusaha. Lama usaha dapat berpengaruh terhadap kemampuan

lainnya, semakin lama seseorang menekuni bidang usahanya akan meningkatkan pengetahuan kondisi pasar yang sedang dihadapinya.



Selain itu, semakin lama seseorang menjalankan usahanya maka akan semakin terampil melakukan pekerjaan dan semakin baik pula pola berpikir dan keputusan yang diambil untuk lebih meningkatkan omset penjualan (Arjuna,2018).

Hubungan antara lama usaha dan permintaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) biasanya berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan dan kelayakan usaha di mata lembaga keuangan. Semakin lama suatu usaha beroperasi, biasanya semakin besar kredibilitas dan stabilitas usaha tersebut, yang dapat meningkatkan peluang mendapatkan akses ke KUR. Lama usaha juga mencerminkan pengalaman pemilik dalam mengelola bisnis, sehingga lembaga keuangan cenderung merasa lebih yakin akan kemampuan pengusaha dalam mengembalikan kredit. Faktor pendukung lainnya meliputi: rekam jejak keuangan, stabilitas pendapatan, aset yang dimiliki, dan kinerja bisnis yang konsisten.

Semakin lama pelaku UMKM menjalani usahanya maka semakin beragamlah kebutuhan untuk meningkatkan usaha tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan juga modal yang lebih besar untuk menjangkau pasar yang lebih besar, serta peningkatan produktivitas. Modal yang dibutuhkan bias berasal dari salah satunya dari layanan KUR (Lestari,2020).

2.3 Tinjauan Empiris

Penelitian Silitonga, Fransiscus Edward (2020) yang berjudul Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh pengusaha UMKM pada Bank Umum di Kota Medan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa pemberian Variabel jangka waktu, pendapatan, dan modal usaha secara simultan berpengaruh dan

terhadap permintaan kredit usaha rakyat. Hal ini berarti kredit usaha masih sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha untuk itu pemerintah



khususnya pemerintah kota Medan hendaknya ikut membantu dengan pemberian modal pinjaman sehingga dapat membantu pelaku usaha untuk mengembangkan usaha yang bertujuan pada meningkatkannya pendapatan yang akan diterima.

Penelitian yang dilakukan oleh Lubis dan Rachmina (2011) dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Realisasi dan Pengembalian Kredit Usaha Rakyat”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi KUR dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembalian KUR Kupedes. Objek penelitian ini adalah nasabah bank BRI Cabang Bogor. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi berganda dan analisis logit. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh usia debitur, jenis kelamin, jumlah tanggungan keluarga, omset penjualan, jenis usaha, lama usaha, jumlah kredit yang diajukan, frekuensi peminjaman kredit, dan nilai agunan terhadap pengembalian KUR. Berdasarkan hasil perhitungan secara statistik faktor-faktor yang berpengaruh signifikan adalah jenis kelamin, kewajiban per bulan, jangka waktu pengembalian, dan tingkat pendidikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Jaya (2018) dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Kredit Usaha Rakyat terhadap Nilai Produksi Usaha Mikro Kecil di Kota Metro”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh KUR, lokasi usaha, dan lama usaha seluruh nasabah yang menerima KUR di PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Metro. Alat analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda dengan variabel dummy untuk mengetahui pengaruh antara variabel KUR, lokasi usaha, lama usaha. Berdasarkan hasil perhitungan secara statistik, hasil penelitian tersebut lokasi usaha dan lama usaha berpengaruh secara signifikan terhadap nilai produksi usaha mikro kecil dan



Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2013) dengan judul penelitian “Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jateng terhadap Perkembangan Usaha Mikro di Kabupaten Boyolali” yang ditinjau dari ongkos produksi, omset penjualan, keuntungan, dan jumlah jam kerja dari usaha mikro kecil antara sebelum dan sesudah menerima kredit usaha rakyat dari Bank Jateng Cabang Boyolali. Objek yang dibunakan dalam penelitian ini adalah nasabah Bank Jateng Cabang Boyolali yang menerima KUR. Pada penelitian ini, terdapat hubungan yang signifikan antara omset penjualan dan jumlah jam kerja dengan permintaa Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Penelitian yang dilakukan oleh Tika Dwi Nur Atin (2019) dengan judul penelitian “Pengaruh Efektivitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Peningkatan Profit Usaha Mikro (Studi kasus pada nasabah Bank Rakyat Indonesia Unit Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta)” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektivitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap peningkatan profit usaha mikro pada nasabah Bank Rakyat Indonesia Unit Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta.

Empat aspek penilaian efektivitas dalam penelitian ini yaitu ketepatan penggunaan dana, jumlah kredit, beban kredit, dan prosedur berdasarkan penilaian nasabah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif kausal dengan pendekatan kuantitatif, dimana penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan antar satu variabel dengan variabel lain yang bersifat sebab akibat. Hasil penelitian ini menunjukkan abhwa Efektivitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari aspek Ketepatan Penggunaan Dana, Jumlah Kredit, dan Prosedur termasuk dalam kategori efektif, sedangkan dari aspek Ketepatan Beban Kredit termasuk

ategori sangat efektif.



Penelitian yang dilakukan Hasri Ramadani (2019) dengan judul penelitian “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor suku bunga, administrasi dan pelayanan, lingkungan atau rekomendasi, dan jangka waktu, terhadap pengambilan kredit usaha rakyat (KUR) usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menguji faktor yang paling dominan terhadap pengambilan KUR UMKM. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa faktor yang paling dominan dalam pengambilan KUR UMKM di kota Makassar adalah faktor Suku Bunga, hal ini dikarenakan pada umumnya UMKM akan lebih memilih kredit modal dengan suku bunga yang lebih rendah agar lebih mudah untuk memenuhi kewajibannya, faktor selanjutnya adalah administrasi dan pelayanan, semakin mudah dan semakin cepat proses pengajuan kredit modal maka akan semakin mempengaruhi keinginan UMKM dalam memilih KUR.

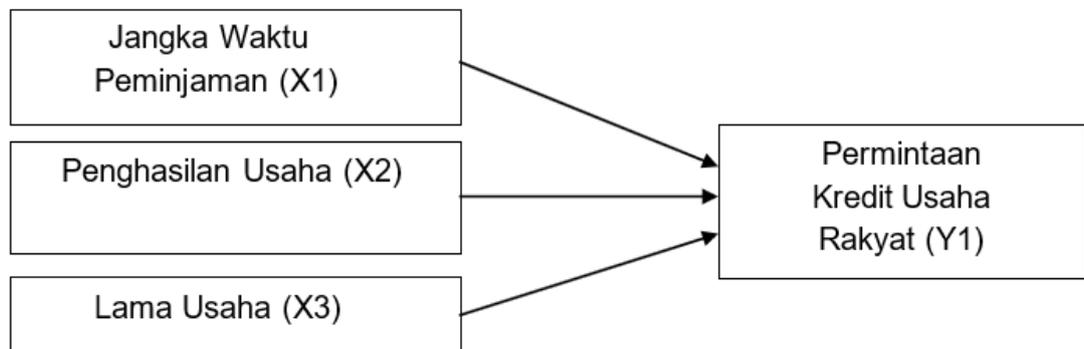
2.4 Kerangka Pikir Penelitian

Jangka waktu kredit akan memberikan pengaruh positif terhadap permintaan kredit usaha rakyat dimana semakin tinggi jangka waktu kredit yang diberikan oleh pihak bank maka akan semakin tinggi minat masyarakat dalam melakukan permintaan kredit usaha rakyat. Disamping itu, lama usaha merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi permintaan terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR). Semakin lama suatu usaha dianggap semakin terampil dan omset penjualan semakin meningkat, sehingga lama usaha berpengaruh positif

› permintaan kredit usaha rakyat (KUR).



Semakin tinggi penghasilan usaha yang dihasilkan maka semakin besar kredit usaha rakyat yang dapat diajukan guna menjadi tambahan modal yang digunakan dalam mengembangkan usahanya, dengan penghasilan usaha tersebut dapat diketahui bahwa kemampuan seseorang dalam mengembalikan kredit usaha rakyat nantinya. Oleh karena itu penghasilan usaha berpengaruh positif terhadap permintaan kredit usaha rakyat. Berdasarkan uraian di atas maka pengaruh dari masing-masing variabel independent terhadap variabel dependen dapat digambarkan seperti gambar di bawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan teori ataupun hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga Jangka Waktu Peminjaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Bone.
2. Diduga Peghasilan Usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Bone.



Lama Usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan saha Rakyat di Kabupaten Bone.